

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Nahdhatul Ulama merupakan salah satu bagian dari sejarah panjang berdirinya bangsa Indonesia, NU menjadi organisasi episentrum umat Islam sebelum merdeka hingga saat ini. Nahdhatul Ulama merupakan salah satu ormas Islam dengan persebaran anggota secara merata dari berbagai macam kalangan masyarakat. Nahdhatul Ulama didirikan oleh KH. Hasyim Ashari beserta kyai sepuh lainnya di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H). dilatarbelakangi oleh pemikiran dan pembeharuan Islam yang menghendaki segala bentuk amaliah. sebuah paradigma pemikiran agar ajaran umat islam murni kembali tanpa sistem bermahzab. Dengan pola pikir rasionalitas dan mengedepankan kemampuan akal dengan realitas empirik, tujuan didirikannya Nahdhatul Ulama adalah untuk menegakkan ajaran islam menurut paham *ahlussunnah waljama'ah* di tengah kehidupan bermasyarakat, dalam bentuk agama, pendidikan, sosbud dan ekonomi (Ismail, faisal2007: 7).

Dalam perjalanan berdirinya Nahdhatul Ulama, dengan mayoritas penganut ajaran islam terbesar dengan jumlah 91 juta jiwa di Indonesia, maka membentuk Badan Otonom Nahdtahul Ulama dengan tujuan untuk mengklasifikasikan berbagai macam pengamalan ajaran dan kegiatan Nahdatul Ulama dalam berbagai jenjang, usia dan jenis kelamin. Badan otonom NU adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan kelompok

masyarakat tertentu dan beranggotakan secara perorangan. Salah satu badan otonom NU adalah Fatayat NU, secara organisatoris Fatayat NU beranggotakan perempuan berusia di bawah usia 45 Tahun. Dalam AD/ART pasal 2 menjelaskan secara spesifik tujuan didirikannya Fatayat NU untuk menyadarkan para wanita Islam Indonesia sesuai dengan kewajibannya sehingga menjadi ibu yang sejati dalam memperkuat dan membantu pekerjaan NU dalam menegakkan Islam (Ismail, Faisal 2007: 65). Secara kelembagaan Fatayat bertugas untuk menanamkan nilai-nilai ajaran NU kepada kaum perempuan dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya. Ini merupakan lahan yang sejak pertama kali Fatayat didirikan mendapat perhatian penting karena pembangunan material tidak akan sukses jika tidak diiringi pembangunan spiritual. Fatayat NU mengintensifkan pendidikan bagi kaum perempuan sehingga dapat memperkuat dan membantu pekerjaan NU dalam menegakkan dan melestarikan ajaran Islam. Perjuangan Fatayat menjadi salah satu sejarah bangsa Indonesia, peran besar Fatayat dalam berbagai bidang dakwah berbasis edukasi keagamaan serta pendidikan harus diapresiasi. Konsep dakwah keagamaan dengan memperkenalkan nilai-nilai kultur, syariat Islam bagi perempuan mendapat ruang di kalangan perempuan NU. Sebagai salah satu roda penggerak NU yang memiliki fanatisme sangat kuat secara struktur kelembagaan, Fatayat hadir sebagai garda terdepan pengawal serta menyebarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Nahdhatul Ulama. Pada tahun 1950 an muncul gagasan dari pengurus PBNU untuk mencalonkan anggota DPR, DPRD dan Kostituante dari kalangan perempuan, pada saat pemilu pertama tahun 1955 NU mengirimkan 45 wakilnya ke lembaga legislative, dengan 5 orang diantaranya merupakan representasi dari kalangan perempuan melalui partai Masyumi (Ismail, Faisal 2007: 30).

Dalam perjalanan panjang terurai dalam bingkai Nahdhatul Ulama sumbangsih dan tantangan bagi Fatayat NU sangat beragam di masing-masing rezim pada era orde lama, orde baru hingga reformasi. Secara organisatoris Nahdlatul Ulama terlepas dari kegiatan politik praktis baik pada saat orde lama maupun orde baru. pasca reformasi namun secara jelas bahwa NU bermanuver secara implisit melawan rezim orde baru, dengan berafiliasi dalam partai politik bentukan ketum PBNU KH. Abdurahman Wahid pada medio 1998. Salah satu karakteristik Nahdlatul Ulama adalah Fanatisme anggota serta mobilisasi anggota yang begitu masif melalui intruksi maupun arahan dari tokoh sentral NU dan Ulama, sehingga berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi presiden pada pemilu tahun 1999 melalui koalisi poros tengah yang digagas oleh partai yang berafiliasi islam, meskipun pada masa itu PKB menempati urutan ketiga hasil pemilu tahun 1999. Begitu juga dengan perempuan NU, sejak dari medio pemilu tahun 1955 hingga sekarang keterwakilan perempuan NU terwakili dalam parlemen. dengan semangat juang untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman secara spesifik. persebaran anggota di seluruh wilayah NKRI, Fatayat menjadi salah satu objek yang disubordinasikan oleh sebagian aktor politik guna mendapatkan irisan suara mereka. Persebaran Fatayat di masing-masing daerah sudah terbentuk secara organisatoris mulai tingkatan ranting, cabang, wilayah hingga pusat, garis haluan organisasi juga bersifat top down sehingga mempermudah pada saat konsolidasi. Secara kelembagaan Fatayat mengalami pergeseran nilai secara kultur organisasi, proses transformasi begitu panjang membuat beberapa pihak melihat adanya potensi dalam organisasi Fatayat dalam kontestasi politik. Dalam momentum kontestasi pemilu dari masa ke masa, anggota Fatayat terlibat dalam kegiatan politik praktis sebagai calon anggota legislative

baik tingkat kota, provinsi dan pusat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewakili suara perempuan di parlemen terutama yang tergabung dalam Fatayat ataupun Muslimat.

Dalam momentum kontestasi pemilu 2019 terdapat dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, kandidat yang pertama petahana yaitu Ir.H. Joko Widodo berpasangan dengan KH.Ma'ruf Amin diusung gabungan koalisi besar diantaranya partai GOLKAR, PDIP, PPP, NASDEM, HANURA, PKB, PERINDO, PKPI DAN PBB. Kandidat nomor urut dua yaitu pasangan H.Prabowo Subianto berpasangan dengan H.Sandiaga Salahudin Uno didukung oleh Koalisi partai GERINDRA, PAN, PKS, BERKARYA. euforia pilpres 2019 sangat kental dengan isu sara dan politik identitas. Efek domino dari kisruhnya pilgub DKI Jakarta berbuntut panjang terhadap dinamika menuju kursi istana presiden pada pemilu 2019. politisasi ormas dan dogma agama yang menjadi salah satu isu pada pilgub DKI berefek secara lebar ke dalam pilpres 2019. sehingga koalisi yang mengatasnamakan Koalisi Indonesia Kerja memutuskan untuk memilih cawapres melalui kalangan Nahdlatul Ulama, dengan menggandeng Rais Syuriah PBNU sekaligus guru bangsa yaitu KH.Ma'ruf Amin, sebagai pendamping petahana. Meskipun secara statistik survey menunjukkan elektabilitasnya rendah jauh di bawah Prof. Mahfud MD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sri Mulyani, Anies Baswedan dan tokoh lainnya. Namun partai pendukung petahana seperti PKB, PPP & PBB, dengan jeli melihat potensi suara warga NU yang mencapai 91 juta jiwa untuk dikonsolidasikan ke tingkatan pusat hingga daerah. Keputusan tersebut mengalami problematika secara kelembagaan. NU secara organisasi memang lepas dari setiap peristiwa politik di tanah air, tetapi dengan representasi para

tokoh Nahdhiyin di lingkup eksekutif, legislative semakin menguatkan basis Nahdhiyin dalam momentum pilpres. Sikap *tasamuh* dan *tawadhu* warga NU kepada kyai sepuh dapat dibaca dengan jelas oleh para tokoh-tokoh partai, maka dengan segala cara bentuk strategi pada perhelatan pilpres 2019 dilakukan oleh masing-masing pasangan dengan basis suara pemilih massa masing-masing.

Fatayat NU berperan aktif dalam gerakan mendukung salah satu paslon berlatar belakang Nahdhiyin, apalagi beberapa Tokoh kunci Fatayat banyak yang menjadi para politisi dari partai dengan afiliasi keislaman yang kuat seperti Dr. Dra. Ida Fauziah, M.Si (mantan Ketua Umum PP Fatayat NU sekaligus Politisi PKB). Dengan semangat juang serta militansi secara kultural, system satu komando Fatayat menjadi salah satu organisasi perempuan yang mempunyai basis suara begitu kuat di Indonesia. Tujuan edukasi keagamaan, sosial dan budaya guna mengamalkan nilai-nilai keislaman ditumpangi dengan kegiatan politik secara kelembagaan. Fatayat dengan spirit perjuangan begitu kuat akhirnya masuk ke dalam kepentingan politik praktis. Peran ulama begitu kuat dalam subordinasi hak politik Fatayat guna mendapatkan dukungan dari Fatayat. partai dengan afiliasi islam memang selama ini menjadi representasi pilihan politik para Fatayat NU. karena figure sentral tokoh muslimat terjun ke politik praktis sejak tahun 1955 dengan tujuan untuk mewakili keterwakilan perempuan dalam parlemen. Secara elektoral, anggota Fatayat dalam beberapa perhelatan pemilu mempunyai pandangan dan pilihan politik secara organisasi. tumpang tindih antara kepentingan dan kebutuhan elite tidak memikirkan efek domino begitu electoral apabila tujuan Fatayat sudah kontradiksi dengan ukwuwah dalam pendiriannya. Sehingga berdampak sebuah problem dalam sebuah organisasi, jelas suara perempuan Nahdhiyin

dan haknya sudah tersubordinasi oleh kepentingan politik, sehingga menjadi potensi besar partai politik untuk diperebutkan dalam sebuah perhelatan kontestasi pemilu. Perempuan secara hak politik bebas untuk menentukan pilihan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing, sebaliknya pada sebagian perempuan Nahdhiyin secara hak politik mereka sudah terhegemoni melalui dalil agama dan intruksi para ulama dalam setiap momentum pemilu.

Kontestasi pilpres 2019 beda dengan pilpres sebelumnya, berbagai bentuk politisasi ormas melalui berbagai macam informasi HOAX rawan menyebabkan konflik. Begitu juga dengan Kota Malang dengan mayoritas penduduk akulturasi antara warga Nahdhiyin dan masyarakat abangan. Kota Malang menjadi Kota sentral di Jawa Timur baik dilihat dari segi pemerintahan, Ekonomi, pendidikan dan peristiwa politik. Salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama sangat eksis di Kota Malang dalam pergerakan dan kegiatannya adalah Fatayat NU. Populasi masyarakat serta besarnya suara partai islam di kota tersebut membuat jumlah keanggotaan Fatayat sangat besar. Apalagi salah satu tokoh sentral organisasi perempuan NU Jawa Timur berasal dari Kota Malang, memiliki sikap kharismatik dan jumlah pengikut sangat besar. Nyai Mutmainah Hasyim Muzadi adalah istri Almarhum KH. Hasyim Muzadi (mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo serta mantan ketum PBNU). Selanjutnya ada ketua umum PWNU Jawa Timur KH. Marzuki Mustamar yang sosoknya kontroversial pada pilpres 2019 dengan pidatonya dalam mengintruksikan warga NU Jawa Timur untuk memilih pasangan capres dan Cawapres berlatarbelakang NU pada sebuah acara sambutan di kantor PWNU Jatim (Detik.com 07 April 2019). Fatayat NU Kota Malang merupakan salah satu badan otonom NU dengan presentase

terbesar di Jawa Timur, dengan patrone Nyai Hasyim Muzadi sudah sejak lama melakukan dakwah maupun berbagai bentuk kegiatan social di Kota Malang sejak era reformasi. Fatayat Kota Malang terbagi dalam lima ranting dengan populasi yang cukup besar, eksistensi Fatayat kota Malang hingga saat ini dalam membuat agenda dan dakwah sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kebiasaan perempuan Nahdiyini di kota tersebut. Irisan suara Fatayat Kota Malang begitu besar sehingga dalam setiap tahun politik seringkali disubordinasikan oleh aktor politik melalui proses hegemoni dengan penggunaan dalil serta intruksi dari ulama, guna mendukung salah satu kontestan, baik dalam pilkada, pileg maupun pilpres.

Suara Fatayat NU Kota Malang pada kontetasi pilpres 2019 didorong untuk mendukung pasangan petahana Ir. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin yang mewakili keterwakilan NU. tujuannya guna mendukung salah satu paslon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh salah satu partai dengan representasi islam. Bentuk konsolidasinya melalui gerakan JKSN (Jaringan kyai santri nasional) bentukan Gubernur Jatim terpilih 2018-2023, Dra. Khofifah Indar Parawansa M.Si yang notabene merupakan ketua umum Pengurus Pusat Muslimat NU tahun 2015-2020. secara terbuka membuat agenda pengajian dan deklarasi untuk mendukung petahana dalam pilpres 2019. Deklarasi dilakukan pada tanggal 27 Februari 2019 di GOR Ken Arok, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. dengan dihadiri oleh fungsionaris PBNU serta kyai sepuh NU Kota Malang. Tokoh politik serta anggota legislative, agenda tersebut dihadiri oleh puluhan ribu perempuan Nahdiyini yang tergabung dalam Muslimat dan Fatayat NU Kota Malang. dalam agenda tersebut melakukan deklarasi menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut 01 yaitu Ir. Joko Widodo dan KH.

Ma'ruf Amin. dukungan dilakukan baik secara terlembaga, kultural dan struktural, dengan penguatan basis suara di kalangan Perempuan NU Kota Malang. Kegiatan yang sudah terlembaga ini terus dilakukan, memang secara AD/ART organisasi Fatayat tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. realitas yang terjadi bahwa Fatayat memang sudah dimobilisasi untuk pemenangan salah satu partai dan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilu 2019. Para perempuan tergabung dalam Fatayat memang sangat mudah digerakkan oleh kekuatan struktural, ini menjadi salah satu catatan yang harus diperbaiki. bahwa politik praktis di kontestasi pemilu 2019 sudah mensubordinasikan suara perempuan dalam organisasi keagamaan untuk mendulang suara dari beberapa representasi ormas keagamaan di Indonesia. Fatayat NU Kota Malang dengan fanatisme begitu kuat, basis elektoralnya merambah sampai ke semua golongan perempuan dari berbagai macam profesi dan wilayah. dengan *patrone* Nyai Hasyim Muzadi, Fatayat di Kota Malang terlibat dalam dinamika pemilu 2019, selain aktif dalam kegiatan social ataupun keagamaan. Ini menjadi salah satu bukti bahwa di momentum politik saat ini, independensi organisasi perlu kita kaji secara teoritis. apalagi organisasi dengan basic keagamaan, perempuan di subordinasikan oleh kepentingan politik secara terlembaga. Sehingga antara proses pencapaian tujuan dengan realitas sudah terjadi ketidaksinambungan. eksistensi dalam organisasi social keagamaan harus ditegakkan. berimplikasi pada pencapaian tujuan organisasi secara nyata, gerakan social politik praktis saat ini sudah menciderai tujuan dari pendirian Fatayat, subordinasi pada perempuan dalam pilihan politik sangat diatur dan dikendalikan. ini menjadi bukti bahwasannya organisasi perempuan di Kota Malang tidak memiliki arah gerakan yang jelas, proses narasi independensi gerakan mulai



tergerus oleh transformasi gerakan politik secara electoral, maka Fatayat NU sudah ter subordinasi dan terbelenggu oleh proses kepentingan politik praktis pemilu 2019 akibat proses hegemoni oleh ulama.

Dalam sebuah wawancara dengan Tokoh Kunci Fatayat NU kota Malang “Nyai Mutmainah Hasyim Muzadi”, menjelaskan alasan utama kenapa Fatayat mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, dalam konsep yang tertanam dalam kultur NU, anjuran kyai merupakan sebuah wejangan yang harus ditaati oleh seluruh lapisan stakeholder NU. Dalam hal ini secara jelas bahwa pasangan yang diusung oleh koalisi Indonesia kerja merupakan representasi dari kalangan Nahdatul Ulama. dengan track record KH. Ma’ruf Amin dalam keterlibatan di kepengurusan PBNU juga sumbangsih pemikiran untuk bangsa ini, maka warga NU wajib mendukung sebagai kontestan cawapres 2019. Sehingga Fatayat NU Kota Malang menjatuhkan dukungan dan deklarasi kepada pasangan Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin. dengan alasan kunci yaitu mengikuti perintah dari kyai di kalangan NU. dengan fatwa inilah menjadi dasar alasan Fatayat NU Kota Malang dalam memilih pilihan politiknya di pemilu 2019. Sosok KH. Ma’ruf amin inilah yang menjadi alasan kunci pernyataan dukungan secara resmi Fatayat NU Kota Malang dalam pemilu 2019. dalam pemilu 2019 yang sudah dilaksanakan pada 17 april 2019 Fatayat NU Kota Malang dengan intensif dan masif melakukan berbagai macam penggalangan dukungan untuk pemenangan capres dan cawapres 01. berbagai macam stakeholder yang ada dalam structural Fatayat Kota Malang digerakan dalam upaya untuk memaksimalkan gerakan politik yang dilakukan secara terlembaga oleh Fatayat NU Kota Malang. Tidak ada unsur paksaan dalam pilihan politik tersebut, semua hanya patuh dan tunduk terhadap perintah dari kyai

kharismatik NU. dasar argumentasi selanjutnya yang diutarakan “Nyai Mutmainah Hasyim Muzadi” selanjutnya sudah jelas, bahwa intruksi dari PWNU JATIM bahwa warga NU Jawa Timur harus mendukung dan memenangkan pasangan yang memiliki rekam jejak serta lahir dari kalangan NU yang kuat. ”orang NU Jatim bodoh kalau tidak memilih pasangan berlatar belakang NU”. hal ini diutarakan oleh KH. Marzuki Mustamar selaku ketua PWNU Jatim pada salah satu agenda kegiatan di Surabaya (Detik.com 07 April 2019. Spirit perjuangan Fatayat NU Kota Malang dalam kontestasi pemilu 2019 tidak dapat dianggap sepele, dengan presentase ribuan anggota yang tersebar dalam lima Kecamatan di Kota Malang. Anggota Fatayat NU Kota Malang pasca melakukan deklarasi dukungan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN), inisiatif dari Gubernur Jatim terpilih ibu Khofifah Indar Parawansa dilakukan Bersama dalam tujuan guna memenangkan paslon Jokowi- Amin dalam kontestasi Pilpres 2019.

Dalam keterkaitan antara peran Fatayat Kota Malang dalam melakukan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 01 membuat banyak pihak mempunyai pandangan dan gagasan masing-masing, Fatayat Kota Malang memiliki pola yang berbeda dengan organisasi perempuan lainnya, dalam penentuan pilihan politik berbasis intruksi dan doktrin agama. dalam berbagai kesempatan fanatisme anggota Fatayat ke salah satu partai politik dengan afiliasi islam memang sangat kental terjadi. dapat dilihat dari proses pasca penyelenggaraan deklarasi dukungan kontestan sampai proses tahapan pemilu susah terjadi. proses panjang yang sudah terjadi membuat intensitas dalam pemenangan salah satu kontestan semakin kuat, dengan berbagai cara dan bentuk melakukan kampanye kepada masyarakat secara luas. Fatayat Kota Malang juga memiliki representasi tokoh yang duduk sebagai anggota parlemen pusat, membuat

hierarki secara keseluruhan. banyak sekali anggota Fatayat NU Kota Malang yang menjadi calon anggota parlemen tingkat Kota Malang. Ini menjadi dasar argumentasi bahwa memang tidak hanya sebagai komoditas dalam kontestasi politik saja. tetapi Fatayat Kota Malang menjadi objek potensial dari dalam anggotanya sendiri dalam proses demokrasi. Maka hal tersebut menjadi kunci bahwa pergerakan politik organisasi perempuan islam Kota Malang sebagai gerakan social yang sangat masif dalam proses tahapan pemilu 2019. dengan menggunakan segala sumber daya organisasi yang ada dalam lingkup organisasi untuk bertujuan dalam pemenangan salah satu kontestan pemilu 2019 dalam berbagai tingkatan yang ada.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah saya uraikan di atas, maka dalam fenomena kontestasi Pilpres 2019 Fatayat NU Kota Malang melakukan dukungan dan melakukan deklarasi terhadap salah satu pasangan nomor urut satu yaitu Ir.H. Joko Widodo Berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin merupakan representasi masyarakat Nahdhiyin. Fatayat NU Kota Malang dengan tegas sudah menyatakan dukungan ke salah satu kontestan melalui kegiatan pengajian Deklarasi yang dihadiri oleh Khofifah Indar Parawanda (Gubernur Jatim sekaligus Tokoh Perempuan NU), beberapa kyai sepuh, tokoh politik Kota Malang serta anggota Legislatif dari salah satu partai berafiliasi islam. Perempuan Nahdhiyin di Kota Malang secara hak politiknya ter subordinasi oleh kepentingan ulama, sikap tawadhu dan tasamuhnya perempuan NU dimanfaatkan oleh sebagian oleh aktor politik guna diambil irisan suaranya untuk pemenangan kontestan dengan background NU dan partai berafiliasi keislaman. Secara jelas bahwa potensi besar Fatayat NU Kota Malang dengan persebaran puluhan ribu anggota di setiap

wilayah. fanatisme yang sudah terbangun secara organisatoris membuat Fatayat memiliki kans yang besar untuk diperebutkan irisan suaranya. beberapa tokoh penggerak Fatayat Kota Malang yang terjun ke politik praktis juga memiliki andil besar dalam kegiatan tersebut, representasi anggota yang duduk di parlemen membuat eksistensi Fatayat Kota Malang semakin kuat di kancah pemilu 2019.

Fatayat dengan gerakan melakukan mobilisasi pada setiap agenda kegiatan mereka pasca deklarasi. Kegiatan penguatan nilai keislaman pada perempuan NU sudah terkooptasi ke dalam politik praktis secara organisasi secara elektoral. sehingga membuat hak politik Fatayat NU Kota Malang disubordinasikan dengan doktrin dan provokasi secara terlembaga yang sudah melenceng dari tujuan organisasi tersebut. Fanatisme yang begitu kuat dalam jiwa perempuan NU kota Malang disubordinasikan oleh kepentingan politik dan parpol islam semata. padahal dampaknya pasca melakukan dukungan tersebut belum jelas dan tidak ada kontrak politik secara jelas kepada kontestan yang didukung dalam setiap fonemena pemilu. Perempuan NU diharapkan hak politiknya tidak tersubordinasi oleh kepentingan elite, tokoh sentral dalam organisasi Fatayat Nu Kota Malang untuk kepentingan politik semata tanpa melihat aspek-aspek dalam asas demokrasi bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan, provokasi ataupun doktrin dari salah satu golongan tertentu demi kepentingan golongan semata.

1. Bagaimana Model Gerakan Sosial Fatayat NU Kota Malang dalam praktik politik Kontestasi Pilpres 2019 ?
2. Bagaimana Mobilisasi Fatayat NU dalam Gerakan Sosial Politik dan praktik politik dalam Kontestasi Pilpres 2019 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait dampak dan manfaat Fatayat NU Kota Malang dalam gerakan social politik praktis dalam kontestasi pemilu 2019. Secara konkret tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Model Gerakan Sosial Fatayat NU Kota Malang dalam praktik politik Kontestasi Pilpres 2019.
2. Untuk mendalami dan menganalisis Mobilisasi Fatayat NU dalam Gerakan Sosial Politik dan praktik politik dalam Kontestasi Pilpres 2019.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

1. Sebagai masukan bagi Perempuan NU untuk mengedepankan asas demokrasi dalam setiap fenomena pilpres.
2. Sebagai masukan untuk partai politik untuk tidak memanfaatkan irisan suara perempuan NU dalam kontestasi pemilu.
3. Sebagai bahan rujukan dan analisis terkait dengan independensi organisasi keislaman dalam kontestasi pemilu 2019, sehingga sebagai bahan untuk menjaga nilai-nilai kultur Fatayat sesuai dengan tujuan utama dalam pendiriannya.
4. Sebagai sumber referensi dan informasi bagi para pembaca terkait dengan penelitian organisasi perempuan dalam gerakan social politik pemilu 2019.